

Tahun	2023	Kelompok	-
Judul Inovasi	PeRAN Si-GRK	Tanggal Mulai Inovasi	-
Instansi Pelaksana	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	URL Bukti Inisiasi Inovasi	LINK
Wilayah			
Nama Inovator	Bappelitbangda prov sulsel		

Detail Proposal

1. Ringkasan

RINGKASAN: Fenomena perubahan iklim saat ini menjadi perhatian serius dan pemerintah Indonesia telah berkomitmen berkontribusi menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 29% dengan upaya sendiri dan 41% dengan bantuan internasional di tahun 2030. Bukti keseriusan tersebut ditunjukkan dengan mengintegrasikan target penurunan emisi GRK kedalam RPJMN 2020-2024. Hal ini kemudian ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah (provinsi) dengan menetapkan target penurunan emisi GRK di tingkat daerah sebagai wujud dukungan atas komitmen Indonesia tersebut. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah menetapkan target sebesar 3,5 juta ton CO₂eq hingga tahun 2030. Sebagai upaya pencapaian target, pemerintah provinsi Sulawesi Selatan menetapkan penurunan emisi GRK menjadi salah satu indikator kinerja utama dalam dokumen RPJMD Tahun 2020-2024. Hal ini juga menjadi dasar bagi kabupaten/kota untuk berkontribusi dalam pencapaian target tersebut sebagai bentuk dukungan pemerintah kabupaten/kota terhadap program prioritas pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Gagasan pelibatan kabupaten/kota dalam pelaporan, evaluasi dan pemantauan aksi mitigasi GRK melalui aplikasi AKSARA mulai diinisiasi tahun 2019 dengan membuat pilot project di 7 kabupaten/kota. Kemudian setelah dasar regulasi telah ditetapkan di tahun 2020, maka pelaporan, evaluasi dan pemantauan telah melibatkan 24 kabupaten/kota se-Provinsi Sulawesi Selatan. *berlanjut pada file PROPOSAL PeRAN SI-GRK

Link

https://drive.google.com/drive/folders/1u4u8LXWhEqcfdpWrDOdpeuOrIgF6vCkN?usp=share_link

2. Ide Inovatif

IDE INOVASI: Penyusunan kaji ulang Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) merupakan upaya pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam mendukung pencapaian target nasional penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 29% dengan upaya sendiri dan 41% dengan dukungan internasional pada tahun 2030 sebagaimana tertuang dalam Paris Agreement, yang kemudian ratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate Change (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa- Bangsa mengenai Perubahan Iklim). Komitmen tersebut kemudian dikenal dengan istilah Intended Nationally Determined Contribution (INDC). Menindaklanjuti komitmen tersebut, target penurunan emisi GRK Prov. Sulsel hingga tahun 2030 juga telah ditetapkan melalui PERGUB Nomor 59 Tahun 2013 yang kemudian diubah menjadi PERGUB Nomor 11 Tahun 2020. PERGUB tersebut berisi target dan rencana penurunan emisi GRK hingga tahun 2030 untuk masing-masing sektor yang terbagi atas sektor: hutan dan lahan, pertanian, energi dan transportasi, limbah dan kelautan pesisir (blue carbon). Selain itu PERGUB ini juga telah mengatur tentang pelibatan pemerintah kabupaten/kota, akademisi, swasta, NGO dan stakeholder lainnya. Target penurunan emisi GRK Tahun 2030 sebesar 3,5 juta ton Co₂eq atau sebesar 5,6% dari total emisi yang dihasilkan (BAU) berdasarkan hasil hitungan kaji ulang RAD-GRK Prov. Sulsel diharapkan dapat dicapai melalui kegiatan mitigasi yang dilaksanakan oleh

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup provinsi. Tapi dengan melihat kecenderungan kebijakan alokasi penganggaran dan adanya pandemi covid-19, target tersebut akan sulit dicapai jika hanya bergantung pada penganggaran pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Masalah lain yang dihadapi adalah kurangnya aksi/kegiatan mitigasi gas rumah kaca yang dianggarkan melalui APBD provinsi sehingga mengakibatkan rendahnya angka capaian penurunan emisi GRK. Untuk itu diperlukan strategi baru dan upaya yang lebih besar untuk membantu pencapaian target tersebut. Pelibatan pemerintah kabupaten/kota dalam pelaporan aksi mitigasi penurunan emisi GRK merupakan strategi dan menjadi sebuah inovasi dan kebaruan yang diinisiasi oleh Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011, pemerintah kabupaten/kota tidak memiliki kewajiban untuk melakukan pelaporan, evaluasi dan pemantauan kegiatan/aksi mitigasi GRK. Namun hasil evaluasi pada tahun 2018 memperlihatkan bahwa dengan upaya sendiri pemerintah provinsi tidak dapat menyelesaikan persoalan penurunan emisi GRK, sementara potensi penurunan emisi GRK terdapat pula pada kegiatan pemerintah kabupaten/kota. Sehingga pada Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2020 mulai dimasukkan unsur kebaruan berupa pelibatan kabupaten/kota dalam pelaporan kegiatan/aksi mitigasi emisi GRK dan ini dikategorikan sebagai sebuah inovasi. Sebelum penetapan PERGUB tersebut, didahului dengan penandatanganan dukungan bupati/walikota se-Sulawesi Selatan sebagai komitmen kabupaten/kota dalam mendukung pencapaian target penurunan emisi GRK Prov. Sulsel. Penandatanganan dukungan tersebut dilaksanakan pada awal tahun 2019 sebagai upaya pengenalan isu pembangunan rendah karbon di pemerintah kabupaten/kota. Sehingga pada saat PERGUB telah ditetapkan pada bulan Februari 2020, pemerintah kabupaten/kota dapat langsung mengimplementasikan dukungan dalam melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan melalui aplikasi AKSARA. Pelaporan melalui aplikasi AKSARA tahun 2020 hingga saat ini telah melibatkan 24 kabupaten/kota.

Link

https://drive.google.com/drive/folders/1u4u8LXWhEqcfdpWrDODpeuOrIgF6vCkN?usp=share_link

3. Signifikansi

SIGNIFIKASI: Pelestarian lingkungan hidup dan perubahan iklim merupakan isu global yang sangat penting dan perlu menjadi dasar pertimbangan dalam setiap pengambilan keputusan terhadap kebijakan pembangunan. Hal ini menjadi dasar pemerintah provinsi untuk mengintegrasikan isu-isu lingkungan hidup dan perubahan iklim ke dalam RPJMD Prov. Sulsel Tahun 2018-2023 dan menjadikan potensi penurunan emisi GRK sebagai salah satu indikator kinerja utama (IKU) sasaran pada Misi 5 RPJMD “Meningkatkan Produktifitas dan Daya Saing Produk Sumberdaya Alam yang Berkelanjutan” dengan sasaran “Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim”. Target penurunan emisi GRK ditetapkan sebesar 1,347 juta ton CO₂eq hingga tahun 2023 (akhir masa RPJMD 2018-2023). Masalah yang dihadapi oleh pemerintah provinsi dalam mencapai target tersebut adalah rendahnya angka pelaporan kegiatan/aksi mitigasi GRK. Dengan terintegrasinya isu lingkungan hidup dan perubahan iklim dalam dokumen RPJMD menjadi dasar/acuan bagi OPD lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan pemerintah kabupaten/kota dalam penyusunan dokumen perencanaan. Dengan termainstreamingnya kebijakan pembangunan rendah karbon dalam dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan, peluang penganggaran program/kegiatan yang dapat menurunkan emisi GRK semakin besar. Peluang implementasi dari PERGUB Nomor 11 Tahun 2020 yang salah satu tujuannya adalah pelibatan kabupaten/kota, akademisi dan stakeholder lainnya menjadi terbuka karena telah terintegrasi mulai dari tataran perencanaan, kebijakan dan regulasi. Demikian juga dengan dukungan penganggaran, pemerintah kabupaten/kota dapat merencanakan dan menganggarkan kegiatan/aksi mitigasi GRK yang mendukung pemerintah provinsi dalam pencapaian prioritas pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD 2018-2023. Dengan melihat besarnya potensi program/kegiatan yang dapat dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota, maka strategi pelibatan pemerintah kabupaten/ kota diyakini dapat mendukung pencapaian target penurunan emisi GRK. Karena pelaporan kegiatan/aksi mitigasi GRK dan capaian penurunan emisi

GRK pemerintah kabupaten/kota merupakan agregat Provinsi Sulawesi Selatan. Dampak dari kegiatan ini adalah naiknya nilai capaian penurunan emisi GRK Provinsi Sulawesi Selatan sebagai bagian dari kontribusi kepada capaian penurunan emisi GRK nasional. Peningkatan capaian penurunan emisi GRK setelah adanya pelibatan kabupaten/kota sangat signifikan sehingga share kontribusi kabupaten/ kota terhadap capaian total sekitar 85% selama kurun waktu 3 tahun terakhir (data tahun 2019-2021). Salah satu keunggulan inovasi ini adalah diakses melalui aplikasi online “AKSARA”, sehingga sangat memudahkan kabupaten/kota dalam penginputan kegiatan/aksi mitigasi GRK dan selama pandemi COVID-19 pelaporan kegiatan tetap berjalan dengan baik. Adapun alokasi dan realisasi anggaran pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan kabupaten/kota untuk penanganan pembangunan rendah karbon Tahun 2019-2021

Link

https://drive.google.com/drive/folders/1u4u8LXWhEqcfdpWrDOdpeuOrIgF6vCkN?usp=share_link

4. Kontribusi Terhadap Capaian TPB

KONTRIBUSI TERHADAP CAPAIAN TPB: Telah terjadi perubahan paradigma konsep mitigasi perubahan iklim, dimana awalnya pada RAN/RAD GRK yang hanya fokus pada penurunan emisi GRK bertransformasi menjadi Pembangunan Rendah Karbon (PRK) dengan tidak hanya fokus pada penurunan emisi GRK namun juga pada pertumbuhan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan. Sejalan dengan itu aplikasi AKSARA juga mengalami penyempurnaan, sehingga hasil pelaporan aksi mitigasi GRK yang dilaporkan bukan hanya menghitung besaran penurunan emisi GRK yang dihasilkan tapi juga menunjukkan pemenuhan tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB/SDGs) berdasarkan ketetapan yang ada didalam daftar TPB/SDGs terkait perubahan iklim. Kontribusi utama inovasi terhadap capaian TPB/SDGs ada pada pilar pembangunan lingkungan tujuan 13 yaitu mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya pada indikator 13.2.1 mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional. Indikator ini merupakan indikator nasional sebagai tambahan indikator global berupa penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 29% di tahun 2030. Hingga saat ini aksi mitigasi yang dilaporkan oleh Provinsi Sulawesi Selatan melalui aplikasi AKSARA telah membantu pencapaian TPB/SDGs untuk 15 tujuan dari 17 tujuan TPB/SDGs. Berikut 5 besar pemenuhan Tujuan TPB/SDGs, dari aksi mitigasi yang dilaporkan,: 1. Tujuan 13 Aksi Terhadap Iklim sebesar 1.060 aksi PRK. 2. Tujuan 15 Kehidupan di Darat sebesar 295 aksi PRK. 3. *berlanjut pada file PROPOSAL PeRAN SI-GRK

Link

https://drive.google.com/drive/folders/1u4u8LXWhEqcfdpWrDOdpeuOrIgF6vCkN?usp=share_link

5. Adaptabilitas

ADAPTABILITAS: Inovasi ini telah diintroduksi kedalam aplikasi website nasional yang dikenal dengan AKSARA dengan link <https://pprk.bappenas.go.id/aksara/> dan tidak diperlukan replikasi pada aplikasi tersebut. Untuk dapat digunakan oleh pemerintah provinsi lain, maka pihak pengembang aplikasi dalam hal ini kementerian PPN/Bappenas hanya perlu menambahkan dan membuat user-id bagi masing-masing kabupaten/kota dalam wilayah provinsinya. Inputan aksi mitigasi GRK dari kabupaten/kota akan terlaporkan, terpantau dan terakumulasi sebagai bagian dari capaian penurunan emisi GRK pemerintah provinsi. Jika pemerintah provinsi lain melakukan langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Provinsi Sulawesi Selatan, maka kontribusi pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) atas pencapaian target nasional penurunan emisi GRK semakin besar. Potensi aksi mitigasi yang dilakukan dan dilaporkan oleh sekitar 514 pemerintah kabupaten/kota dan 34 pemerintah provinsi merupakan peluang yang besar dan harus dapat teridentifikasi dengan baik. Dengan demikian pemerintah Indonesia akan semakin optimis untuk mencapai target penurunan emisi GRK sebesar 29% dengan upaya sendiri di tahun 2030. Strategi pertama yang dilakukan agar inovasi tetap berjalan adalah dengan memastikan bahwa dengung pelaporan emisi GRK harus dimulai dari pimpinan tertinggi. Oleh karena itu pada tahun 2019 tim sekretariat POKJA

Pembangunan Rendah karbon Provinsi Sulawesi Selatan melakukan penandatanganan dukungan/komitmen dari 24 Bupati Walikota se-Provinsi Sulawesi Selatan. Piagam dukungan/komitmen terhadap pelaksanaan pembangunan rendah karbon ini merupakan satu-satunya di Indonesia dari kabupaten/kota untuk mendukung kegiatan mitigasi penurunan emisi GRK. Pada tingkat OPD pemerintah provinsi, strategi yang ditempuh adalah melakukan roadshow ke pimpinan OPD untuk menjelaskan urgensi mitigasi penurunan emisi GRK. Strategi berikut adalah melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Sekretariat Nasional dan Kementerian PPN/Bappenas Direktorat Lingkungan hidup dengan memberikan masukan-masukan terkait pengembangan ide-ide dalam implementasi kebijakan pembangunan rendah karbon. Salah satunya adalah dengan merubah peraturan gubernur yang ditetapkan pada tahun 2012 dengan muatan-muatan baru pelibatan kabupaten/kota dan pemangku kepentingan lainnya. Ide ini didukung oleh sekretariat nasional dengan bantuan pendanaan dan peningkatan kapasitas melalui dukungan mitra pembangunan dan NGOs. Strategi selanjutnya adalah dengan melibatkan 3 (tiga) orang untuk masing- masing OPD sektor dalam kelompok kerja (POKJA). Hal ini ditempuh berdasarkan pengalaman sejak tahun 2011 perpindahan/mutasi anggota di kelompok kerja sangat tinggi. Dengan pelibatan 3 (tiga) orang permasalahan tersebut dapat teratasi. Jika terjadi perpindahan salah satu dari anggota POKJA, maka masih tersisa 2 (dua) anggota POKJA lainnya sehingga keberlanjutan dan kapasitas masing-masing sektor tetap terjaga. Selain itu untuk mendukung pelaporan tepat waktu, telah dibuat SOP pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang termuat dalam pasal

Link

https://drive.google.com/drive/folders/1u4u8LXWhEqcfdpWrDOdpeuOrIgF6vCkN?usp=share_link

6. Keberlanjutan

KEBERLANJUTAN: Sumberdaya yang digunakan terbagi atas keahlian (softskill) berupa kemampuan kelompok kerja dalam mengurai masalah-masalah dan mencari solusi kreatif. Metode yang digunakan adalah metode yang diambil berdasarkan kecenderungan bahwa setiap ASN patuh pada pimpinan sehingga digunakan pendekatan top-down. Untuk mengatasi keterbatasan anggaran, maka ide dan strategi itu direformulasi dalam bentuk Logframe yang ditawarkan ke kementerian PPN/BAPPENAS melalui sekretariat nasional dan kemudian ditindaklanjuti dalam bentuk berbagi peran. Dengan demikian anggaran pengembangan ide dan strategi bisa didapatkan melalui dukungan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan dukungan mitra pembangunan. Untuk memastikan bahwa sumberdaya itu tetap ada maka kelompok kerja (POKJA) Pembangunan Rendah Karbon melakukan pertemuan, diskusi dan FGD untuk mengawal kegiatan dan melihat permasalahan di masing-masing OPD sektor. Hasil pertemuan kemudian ditindaklanjuti, sehingga dengan proses seperti ini maka ide-ide baru untuk memecahkan masalah dapat dirumuskan. Hal ini juga mejadi bagian dari proses peningkatan kapasitas dan kemampuan sumberdaya manusia, sehingga anggota POKJA dapat memiliki kemampuan softskill yang hampir sama. Pertemuan-pertemuan tersebut juga menjadi media pembelajaran dan sharing session sehingga terbangun jejaring antar anggota POKJA. Untuk memastikan keberlanjutan, maka evaluasi dilaksanakan secara online melalui aplikasi AKSARA dengan melihat keaktifan OPD sektor pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam melaporkan kegiatan penurunan emisi GRK. Hasil pelaporan terbuka untuk umum dengan akses yang terbatas untuk melihat hasil pelaporan. Aplikasi dimiliki oleh Bappenas cq Sekretariat Nasional dan dapat diakses 24/7. Indikator yang digunakan untuk menilai adalah ketetapan waktu melaporkan dan ketepatan jenis kegiatan. Output dari inovasi ini adalah adanya laporan aksi penurunan emisi GRK yang tepat waktu dan melibatkan kabupaten/kota sebagai kunci. Faktor penentu keberhasilan adalah pelibatan OPD Pemerintah Provinsi dan pemerintah kabupaten/kota secara aktif dalam melaporkan kegiatan-kegiatan aksi mitigasi penurunan emisi GRK. Keaktifan ini sangat tergantung dari pemahaman personal terhadap kegiatan yang bisa dilaporkan serta dokumen penunjang pelaporan. Sehingga itu pelatihan/workshop terkait pembangunan rendah karbon sangat penting dilaksanakan setiap tahunnya. Kendala dalam mendukung keberlanjutan inovasi adalah pergantian tim teknis di OPD Pemerintah Provinsi dan

pemerintah kabupaten/kota. Setiap terjadi pergantian tim teknis maka perlu dilakukan penyamaan persepsi mulai dari awal. Untuk tingkat provinsi, pelibatan akademi dan stakeholder lain dalam POKJA menjadi salah satu jalan keluar untuk menjamin pengetahuan teknis dan metode analisis masing-masing sektor terjaga

Link

https://drive.google.com/drive/folders/1u4u8LXWhEqcfdpWrDODpeuOrIgF6vCkN?usp=share_link

7. Kolaborasi Pemangku Kepentingan

KOLABORASI PEMANGKU KEPENTINGAN: Evaluasi dilaksanakan secara online dengan melihat keaktifan OPD pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam melaporkan kegiatan aksi penurunan emisi GRK. Hasil pelaporan terbuka untuk umum dengan akses yang terbatas untuk melihat hasil pelaporan. Aplikasi AKSARA dibangun oleh Bappenas cq Sekretariat Nasional dan dapat diakses 24 jam sehari. Indikator yang digunakan untuk menilai adalah ketetapan waktu melaporkan dan ketepatan jenis kegiatan. Output dari inovasi ini adalah adanya laporan yang tepat waktu dan melibatkan kabupaten/kota. Dampak dari kegiatan ini adalah naiknya nilai potensi penurunan emisi GRK provinsi Sulawesi Selatan sebagai bagian kontribusi kepada capaian penurunan emisi GRK nasional. Peningkatan capaian potensi penurunan emisi GRK Provinsi Sulawesi Selatan setelah adanya keterlibatan kabupaten/Kota sangat signifikan sehingga share kontribusi kabupaten/kota terhadap capaian total mencapai 85% dibandingkan dengan awal sebelum kabupaten/kota terlibat. Karena inovasi ini merupakan aplikasi online, maka tingkat keberlanjutannya sangat tinggi dan bahkan selama pandemi COVID-19 pelaporan kegiatan tetap berjalan tanpa kendala berarti. Unsur yang paling berperan dalam memastikan keberlanjutannya adalah person/operator yang bertanggungjawab melakukan pelaporan melalui aplikasi AKSARA. Sehingga harus dipastikan bahwa person/operator tersebut memiliki kemampuan dan mengenal aplikasi tersebut dengan baik serta memiliki pengetahuan teknis dalam mengidentifikasi kegiatan/aksi mitigasi GRK yang dilaksanakan oleh OPD masing-masing. Untuk itu workshop/pelatihan pelaporan aksi

Link

https://drive.google.com/drive/folders/1u4u8LXWhEqcfdpWrDODpeuOrIgF6vCkN?usp=share_link